



## ABILITY TO PAY (ATP) AND WILLINGNESS TO PAY (WTP) THE PREMIUM OF BPJS KESEHATAN MANDIRI IN THE WORKING AREA OF CENDRAWASIH HEALTH CENTER, MAKASSAR

### *Kemampuan Membayar (ATP) Dan Kemauan Membayar (WTP) Iuran BPJS Kesehatan Mandiri Di Wilayah Kerja Puskesmas Cendrawasih Kota Makassar*

Asrijal Arsyad B\*, Lusyana Aripa, Ivan Wijaya

Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Pancasakti, Makassar

\*Alamat Korespondensi: [asrijal.arsyad.baso@gmail.com](mailto:asrijal.arsyad.baso@gmail.com)

Article Info	ABSTRACT / ABSTRAK
<p><b>Article History</b> Received: 10 Mei 2021 Revised : 22 Mei 2021 Accepted : 24 Mei 2021</p>	<p><i>BPJS Health data shows that out of 261 million Indonesians, 70 to 80 million Indonesians do not have health insurance. This is related to the ability and willingness of the community to pay BPJS Health dues. This study aims to determine the ability and willingness to pay BPJS Kesehatan contributions for independent participants in the work area of Puskesmas Cendrawasih, Makassar City. The type of research used is descriptive quantitative research with the research population, namely participants of BPJS Kesehatan Mandiri who are in the Work Area of the Cendrawasih Public Health Center in Makassar City and the total sample is 98 respondents based on the calculation of the Slovin formula. The sampling technique was carried out by means of purposive sampling. The data was collected by means of direct interviews using a questionnaire. The collected data is processed by calculating ATP and WTP and presented in tables and narration. The results showed that the ability to pay or Ability to Pay (ATP) at the Puskesmas Cendrawasih Makassar City in 2020 was 74.5% in the well-off category. Willingness to Pay (WTP) at the Cendrawasih Public Health Center in Makassar City in 2020, namely as much as 61.2% in the willing category. It is necessary to reconsider the BPJS health fee rates based on the ability and willingness to pay the community.</i></p>
<p><b>Keywords :</b> <i>BPJS, contribution, ability to pay, willingness to pay</i></p>	<p>Data BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa dari 261 juta penduduk Indonesia, 70 hingga 80 juta penduduk Indonesia belum memiliki jaminan kesehatan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan dan kemauan masyarakat membayar iuran BPJS Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan kemauan membayar iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri di wilayah kerja Puskesmas Cendrawasih Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan populasi penelitian yaitu peserta BPJS Kesehatan Mandiri yang berada di Wilayah Kerja Puskesmas Cendrawasih Kota Makassar dan jumlah sampel sebanyak 98 responden berdasarkan perhitungan rumus Slovin. Teknik penarikan sampel dilakukan dengan cara <i>purposive sampling</i>. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung menggunakan kuesioner. Data yang terkumpul, diolah dengan perhitungan ATP dan WTP dan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan membayar atau <i>Ability to Pay</i> (ATP) di Puskesmas Cendrawasih Kota Makassar tahun 2020 yaitu sebanyak 74,5% kategori mampu. kemauan membayar atau <i>Willingness to Pay</i> (WTP) di Puskesmas Cendrawasih Kota Makassar tahun 2020 yaitu sebanyak 61,2% kategori mau. Perlunya mempertimbangkan ulang tarif iuran BPJS kesehatan berdasarkan kemampuan dan kemauan membayar masyarakat.</p>
<p><b>Kata kunci :</b> BPJS, iuran, kemampuan membayar, kemauan membayar</p>	

## PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia dan sekaligus menjadi investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa. Di Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia masih jauh terbelakang dibandingkan sebagian besar negara lain di dunia. Hal ini terkait erat dengan rendahnya pembiayaan pelayanan kesehatan baik oleh pemerintah dan swasta maupun masyarakat (Pratiwi R.L dkk, 2016).

Kemampuan membayar kesehatan (Ability To Pay) yaitu besarnya dana yang sebenarnya dapat dialokasikan untuk membiayai kesehatan yang bersangkutan (Noormalasari W dkk, 2015). Pada tahun 2018, sebanyak 50,5% penduduk Indonesia belum memiliki jaminan kesehatan. Masyarakat yang sudah memiliki jaminan kesehatan diantaranya adalah peserta Askes/ASABRI yang dimiliki oleh sekitar 6% penduduk, Jamsostek 4,4%, asuransi kesehatan swasta dan tunjangan kesehatan perusahaan masing-masing sebesar 1,7% serta adanya kepemilikan jaminan kesehatan yang didominasi oleh peserta Jamkesmas 28,9% dan Jamkesda 9,6% (Sahriana A, 2017).

Menurut Deputi Direksi Wilayah Sulsel, peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Sulawesi Selatan (Sulsel) saat ini telah mencapai 8,1 juta jiwa, dan 1,4 juta jiwa penduduk di Sulsel belum terdaftar sebagai peserta BPJS PBI (Kadir. A, 2019). Data Badan Pusat Statistik Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 9.426.853 jiwa (BPS, 2018) dan yang sudah menjadi Peserta JKN-KIS yaitu 8.411.467 jiwa pada tahun 2019. Jadi 89% jumlah penduduk yang menjadi peserta BPJS di Sulawesi Selatan (BPJS, 2019).

Sedangkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019 bahwa Kota Makassar dengan jumlah penduduk 1.663.479 jiwa penduduk yang sudah terdaftar sebagai Peserta BPJS sebanyak 1.286.925 jiwa atau 77,36 % dan jumlah masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta

JKN-KIS yaitu 376.554 jiwa atau 22,64 % (BPS, 2018).

Peran serta masyarakat dalam membayar iuran jaminan kesehatan sangat bergantung dengan ATP dan WTP. Tidak ikut sertanya masyarakat terhadap program JKN dapat dilihat dari kemampuan dan kemauannya untuk membayar iuran. Banyaknya jumlah peserta BPJS yang memiliki tunggakan juga dapat dilihat dari kemampuan dan kemauan membayar iuran. Saat ini tercatat jumlah peserta BPJS Kesehatan yang memiliki tunggakan khususnya di Kota Makassar per Desember 2018 sebanyak 143.794 jiwa penduduk yang menunggak iuran BPJS. Berdasarkan kelas kepesertaan yang paling tinggi jumlah tunggakannya yaitu kelas 3 sebanyak 125.386 penduduk yang menunggak di kota Makassar atau 53,90 % Peserta Non PBI Bukan Penerima Bantuan Iuran yang memiliki tunggakan terbesar. Kepesertaan tertinggi kedua tunggakannya yaitu kelas 1 memiliki jumlah tunggakan 58.780 jiwa atau 25,27% Peserta Non PBI Bukan Penerima Upah, dan untuk kepesertaan kelas 2 memiliki jumlah tunggakan 48.439 atau 20,82% Peserta Non PBI Bukan Penerima Upah (BPJS, 2019).

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari BPJS Kesehatan Kota Makassar jumlah peserta Non PBI Bukan Penerima Upah dari beberapa Kecamatan memiliki tunggakan yaitu rata-rata sebanyak 13.868 jiwa (BPJS, 2017). Puskesmas Cendrawasih yang berlokasi di Kecamatan Mamajang merupakan salah satu Fasilitas Payanan Kesehatan di Kota Makassar yang melayani peserta BPJS. Jumlah masyarakat yang menjadi peserta BPJS di wilayah kerja Puskesmas Cendrawasih mencapai 20.040 jiwa, 11.096 jiwa diantaranya menggunakan BPJS Mandiri yang berpotensi menunggak iuran BPJS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan dan kemauan membayar iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri di wilayah kerja Puskesmas Cendrawasih Kota Makassar.

## BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif observasional dengan pendekatan deskriptif. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada Bulan September sampai November 2020 di Puskesmas Cendrawasih Kota Makassar. Populasi dalam penelitian ini adalah Peserta BPJS Kesehatan Mandiri yang berada di wilayah kerja Puskesmas Cendrawasih yang menggunakan jasa layanan Kesehatan di Puskesmas Cendrawasih selama 3 Bulan terakhir yaitu sebanyak 5162 orang. Sampel penelitian dihitung menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 98 orang dengan teknik penarikan sampel non-probability sampling yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*.

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara wawancara menggunakan kuesioner serta observasi data peserta BPJS di puskesmas. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara univariat terhadap tiap-tiap variable dengan bantuan Aplikasi SPSS dan disajikan dengan tabel distribusi frekuensi dan dilengkapi dengan penjelelasan.

Perhitungan kemampuan membayar (ATP) peserta BPJS dihitung berdasarkan rumus perhitungan yang diajukan Gafni (1991) yaitu total jumlah pendapatan dikurang dengan total jumlah pengeluaran dibagi jumlah tanggungan yang diukur dalam bentuk rupiah kemudian dikelompokkan menjadi kelompok yang mampu membayar dan kelompok tidak mampu membayar. Sedangkan perhitungan kemauan membayar (WTP) peserta BPJS dihitung berdasarkan Kemauan membayar (WTP) normatif yaitu besarnya nilai pengorbanan yang bersedia dikeluarkan oleh masyarakat untuk iuran BPJS Kesehatan yang diukur dalam bentuk rupiah dan dibandingkan dengan besaran iuran yang telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden RI nomor 19 tahun 2016, kemudian dikelompokkan menjadi kelompok yang mau membayar dan kelompok tidak mau membayar iuran BPJS Kesehatan.

## HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta BPJS Kesehatan paling banyak memiliki pendapatan perbulan antara 2.000.000 – 2.999.000 rupiah, yaitu sebanyak 35 (35,7%) responden, dan paling sedikit berpendapatan < 1.000.000 rupiah, yaitu sebanyak 14 (14,3%) responden. Sedangkan pengeluaran responden paling banyak yaitu  $\geq$  1.500.000 rupiah perbulan, yaitu sebanyak 60 (61,2%) responden, dan paling sedikit mempunyai pengeluaran < 500.000, yaitu sebanyak 3 (3,1%) responden (Tabel 1).

Hasil perhitungan ATP dan WTP peserta BPJS Kesehatan di Puskesmas cendrawasih menunjukkan bahwa responden umumnya memiliki kemampuan dan kemauan membayar iuran BPJS kesehatan, yaitu sebanyak 73 (74,5%) responden dengan kategori mampu dan sebanyak 60 (61,2%) responden dengan kategori mau. Sedangkan berdasarkan tingkat pengetahuan, diketahui sebanyak 73 (74,5%) responden memiliki pengetahuan yang cukup mengenai BPJS kesehatan (Tabel 1).

## PEMBAHASAN

Peran serta masyarakat dalam membayar iuran jaminan kesehatan sangat bergantung dengan kemampuan membayar atau Ability to Pay (ATP) dan kemauan membayar atau Willingness to Pay (WTP), karena Ability dan willingness to pay (ATP-WTP) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang mengikuti jaminan kesehatan (Hardi dkk, 2017).

Kemampuan membayar atau Ability to Pay (ATP) merupakan kemampuan masyarakat dalam membayar iuran BPJS Kesehatan untuk mengganti biaya pelayanan yang diterimanya (Fauziyyah I, 2016). Ketetapan pemerintah melalui Peraturan Presiden RI Nomor 19 tahun 2016, menetapkan untuk Kelas I iuran sebesar Rp. 80.000, Kelas II iuran sebesar Rp. 51.000, dan untuk Kelas III iuran sebesar Rp. 25.500.

Pengukuran kemampuan membayar seseorang dalam penelitian ini, dihitung berdasarkan rumus perhitungan yang diajukan

Gafni (1991) yaitu total jumlah pendapatan dikurang dengan total jumlah pengeluaran dibagi jumlah tanggungan yang diukur dalam bentuk rupiah. (Fauziyyah I, 2016).

Hasil perhitungan kemampuan membayar responden menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memiliki kemampuan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan, yaitu sebanyak 74,5%. Tingginya persentase kemampuan membayar responden berbanding lurus dengan pendapatan responden yang mayoritas berada pada range pendapatan antara 2.000.000 – 2.999.000 rupiah per bulan yaitu sebanyak 35,7%, dan >3.000.000 rupiah per bulan yaitu sebanyak 28,6% serta responden mayoritas memiliki jumlah anggota keluarga atau beban tanggungan <4 orang yaitu sebanyak 66,3% sehingga responden memiliki uang lebih yaitu > Rp. 25.500 yang dapat digunakan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.

Menurut Thabrany (2008), semakin banyak jumlah anggota keluarga maka semakin banyak pula kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Susanti D dkk (2014) dengan melakukan

perbandingan kemampuan membayar iuran jaminan kesehatan nasional yang menemukan bahwa pegawai dengan jumlah tanggungan <4 orang memiliki kemampuan membayar Rp. 73.700,00 lebih besar dibandingkan pegawai dengan jumlah tanggungan >4 orang yaitu Rp. 58.500.

Hasil perhitungan kemauan membayar responden menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memiliki kemauan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan, yaitu sebanyak 61,2%. Tingginya persentase kemauan membayar responden juga berbanding lurus dengan pendapatan responden yang mayoritas berada pada range pendapatan antara 2.000.000 – 2.999.000 rupiah per bulan yaitu sebanyak 35,7%, dan > 3.000.000 rupiah per bulan yaitu sebanyak 28,6%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sihaloho E.N (2015) yang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan merupakan determinan kemauan membayar peserta JKN mandiri yang dibuktikan dengan hasil uji Chi-square dengan nilai p value sebesar 0,018 lebih kecil dari 0,05 ( $0,018 < 0,05$ ).

**Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendapatan, Pengeluaran, Kemampuan Membayar (ATP), Kemauan Membayar (WTP) Iuran BPJS Kesehatan di Puskesmas Cendrawasih Kota Makassar**

Variabel	Kategori	n	%
Pendapatan	< 1.000.000	14	14,3
	1.000.000 – 1.999.000	21	21,4
	2.000.000 – 2.999.000	35	35,7
	≥ 3.000.000	28	28,6
Pengeluaran	< 500.000	3	3,1
	500.000 – 999.000	15	15,3
	1.000.000 – 1.499.000	20	20,4
	≥ 1.500.000	60	61,2
Kemampuan Membayar (ATP)	Mampu	73	74,5
	Tidak Mampu	25	25,5
Kemauan Membayar (WTP)	Mau	60	61,2
	Tidak Mau	38	38,8
<b>Total</b>		<b>98</b>	<b>100</b>

Menurut Murti (2000:99), peningkatan pendapatan meningkatkan kemampuan membayar (*ability to pay*), dengan kemampuan ini akan mengendalikan seseorang untuk menghadapi risiko biaya medis ketika sakit sehingga akan semakin besar kemauannya untuk membayar biaya pelayanan kesehatan termasuk iuran asuransi kesehatan. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan Curt L et al (2015) yang menyatakan terdapat hubungan antara pendapatan keluarga dengan kemauan membayar (*Willingness to Pay*) dengan pemaknaan p-value 0,04.

Meskipun kemauan membayar (WTP) responden yang cukup tinggi, namun masih terdapat banyak responden yang masuk kategori tidak mau yaitu mencapai 38,8% responden. Dari hasil wawancara, menunjukkan bahwa iuran BPJS Kesehatan yang ditetapkan pemerintah dianggap terlalu mahal terutama bagi responden dengan pendapatan < 1.000.000 rupiah per bulan sehingga responden menginginkan tarif lebih murah dari tarif iuran BPJS Kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Hal ini dilihat dari usulan iuran yang diajukan responden antara Rp. 10.000 – Rp. 20.000 untuk layanan Kelas III. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Hermanto yang menunjukkan bahwa hasil perhitungan Ability to Pay (ATP) supir truk container di Kota Semarang mampu membayar Rp.25.500,- tetapi Willingness to Pay (WTP) hanya Rp.5.000 - Rp.10.000,- per bulan per kepala (Hermanto, Rimawati, & Ernawati, 2014).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil perhitungan kemampuan dan kemauan membayar responden menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memiliki kemampuan dan kemauan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan, yaitu sebanyak 74,5% dengan kategori mampu dan 61,2% dengan kategori mau.

Diharapkan agar petugas layanan kesehatan terus meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas Cendrawasih, guna meningkatkan

kemauan membayar atau *Willingness to Pay* (WTP) iuran BPJS Kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cendrawasih Kota Makassar. Serta perlu dilakukan kajian ulang mengenai peraturan maupun kebijakan mengenai tarif iuran BPJS Kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan maupun kemauan masyarakat guna meningkatkan kemampuan membayar atau *Ability to Pay* (ATP), kemauan membayar atau *Willingness to Pay* (WTP) iuran BPJS Kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPJS, (2019). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Makassar. Indonesia
- BPS, (2018). Statistical Yearbook of Indonesia 2018. Jakarta. Indonesia; Badan Pusat Statistik.
- Curt L, Thanh N.X, Chuc N.T, Anders E dan Lars L, (2015). *People's willingness to Pay for Health Insurance in Rural Vietnam. Cost Effectiveness and Resource Allocation*. [online]; www.ncbi.nlm.nih.gov diakses: 30 Oktober 2020
- Fauziyah I, (2016). *Analisis ATP (Ability To Pay) Dan WTP (Willingness To Pay) Terhadap Keputusan Penentuan Kelas Iuran Jaminan Kesehatan Pada Sopir Angkot di Kota Semarang*, Skripsi, Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang.
- Hardi dkk, (2018). *Kemauan Dan Kemampuan membayar (Ability -Willingness To Pay) Dalam Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Sektor Informal Pedagang Pasar Tradisionaldi Kota Denpasar 2017*. Jurnal kesehatan terpadu Vol 2. No 2 Hal.96-100.
- Hermanto, A. S., Rimawati, E., & Ernawati, D. (2014). *Kesiapan Pekerja Sector Informal (Sopir Truk Container) Dalam Membayar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Semarang*. Visikes: Jurnal Kesehatan Masyarakat, 13(2)
- Kadir. A, (2019). Peserta BPJS PBI di Sulsel 1,8 juta.(online):<https://makassar.antaranews>.

- com/berita/114258/peserta-bpjs-pbi-di-sulsel-18-juta. (Diakses, 6 Oktober 2019).
- Marzuki D.S, Abadi M.Y, Darmawansyah dkk, (2019). *Analisis Kemampuan Membayar dan Kemauan Membayar Peserta BPJS JKN di Kecamatan Tamalate Kota Makassar*, Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo; Vol. 5 No. 2; Hal 102 – 113
- Murti B., (2000), *Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan*, Yogyakarta, Kanisius.
- Noormalasari. W. dkk. (2019) *Kemampuan Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Nelayan di Kabupaten Jember*. Jurnal Pustaka Kesehatan, vol 3 no 1. Hal 147-154.
- Pratiwi. R & L. M. Said. R. (2016). *Analisis Kemampuan (ATP) Dan Kemauan (WTP) Membayar Premi Bpjs Kesehatan Pekerja Oleh Pemilik UKM Di Pertokoan Tekstil Di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta*. Jurnal Formil (Forum Ilmiah) KesMas Respati, Vol 1, No 2, Hal 95-108.
- Sahriani. A. (2017). *Analisis Kemampuan Membayar (Ability To Pay) Dan Kemauan Membayar (Willingness To Pay) Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Pada Masyarakat Di Pulau Lakkang Kota Makassar*. Skripsi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar
- Sihaloho E.N, (2015). *Determinan Kemauan Membayar Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Mandiri Di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang*, Skripsi, Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
- Susanti D, Sandra C, & Herawati Y.T, (2014). *Perbandingan Kemampuan dan Kemauan Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Antara PT Tiga Serangkai dan CV Fajar Elektronik Kabupaten Jember (A Comparative of Ability and Willingness to Pay Of National Health Care Premium Between PT Tiga Serangkai and CV Fajar Elektronik Jember)*, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa
- Thabrany H, (2008), *Strategi Pendanaan Jaminan Kesehatan Indonesia dalam SJSN*. Jakarta